

OTONOMI DAN PEMBERDAYAAN: REFLEKSI PENDIDIKAN BAGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

M. Syukri¹

Abstrak: Perubahan-perubahan perilaku perempuan dimediasi oleh akuisisi mereka terhadap “otonomi” (kemandirian). Sementara otonomi-diri atau keberdayaan perempuan pada umumnya dikondisikan oleh stratifikasi gender dan otoritas patriarkal masyarakat di mana mereka tinggal, ternyata pendidikan juga dapat meningkatkan kemandirian/keberdayaan perempuan. *Jejeebhoy* (1996) menandakan bahwa ada lima aspek kemandirian perempuan yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, khususnya yang dipengaruhi oleh pendidikan, yaitu: otonomi pengetahuan, otonomi dalam membuat-keputusan, otonomi fisik, otonomi emosional, otonomi ekonomi dan sosial dan percaya-diri. Meskipun teori-teori belajar sosial dapat membantu menjelaskan hubungan antara persekolahan dan perubahan perilaku, namun sekolah bukanlah satu-satunya lingkungan (*setting*) dimana individu dapat mengamati perilaku-perilaku baru dan mendapatkan “sense of self-efficacy” yang dibutuhkan untuk mengadopsi perilaku-perilaku baru tersebut.

Kata-kata Kunci: *autonomy* (keberdayaan), *empowering* (pemberdayaan)

Pendahuluan

Pada awalnya tidak satupun penelitian para ahli kependudukan yang menyinggung tentang konten atau mutu pendidikan yang diselenggarakan institusi pendidikan formal (persekolahan). Eksplanasi paling sederhana tentang mengapa para wanita terdidik memiliki lebih sedikit jumlah anak dan lebih baik dalam mengasuh/merawat anak, karena sebelumnya ketika mereka bersekolah telah diajarkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skills*) dibutuhkan dalam mempraktekkan perencanaan keluarga (*family planning*), termasuk pengasuhan/perawatan anak. Sebaliknya, seiring dengan semakin memasyarakatnya penyelenggaraan sekolah dasar di negara-negara sedang berkembang ternyata memunculkan

¹ M. Syukri adalah dosen Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP-UNTAN Pontianak

pertanyaan baru yang tidak bisa direspon dengan eksplanasi sederhana tersebut.

Dalam dekade 1970-an, sekolah dasar umumnya tidak mengajarkan tentang kesehatan reproduktif atau kesehatan keluarga, namun pertanyaan mendasar adalah: Bagaimana pendidikan mempengaruhi perubahan perilaku khususnya dalam hal perencanaan keluarga yang lebih baik? Untuk merespon pertanyaan ini, maka perlu dielaborasi bagaimana pengaruh pendidikan terhadap perubahan perilaku dan kemandirian. Bahkan berdasarkan temuan studi, otonomi merupakan jalan tengah antara persekolahan dan perubahan perilaku peserta didik atau warga belajar.

Permasalahan

Berangkat dari postulat bahwa seorang person (perempuan) yang mengadopsi suatu perilaku baru mesti tidak hanya menjadi menyadari (*aware*) perilaku tersebut, tetapi juga memperoleh suatu perasaan kemampuan diri atau *sense of self-efficacy* – keyakinan bahwa dirinya dapat melakukan perilaku secara efektif dan karenanya dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Keberdayaan (otonomi) perempuan dipengaruhi oleh pendidikan yang diharapkan merubah perilaku yang dikondisikan oleh stratifikasi gender dan otoritas patriarkal masyarakat dimana mereka tinggal. Pada sisi lain, belum dijumpai bukti-bukti dari hasil penelitian tentang pencapaian tujuan pendidikan yang menggunakan indikator-indikator pengukuran dari teori-teori belajar sosial untuk pemberdayaan perempuan yang dapat menumbuhkan kesadaran baru, pengetahuan baru, dan meningkatkan *sense of self-efficacy* (pemberdayaan) perempuan sebagai peserta belajar.

Berangkat dari pemikiran tersebut, masalah-masalah yang akan dibahas dalam kajian ini berkisar pada pertanyaan-pertanyaan: apa kemandirian dan pemberdayaan ?; bagaimana teori-teori belajar sosial menjelaskan perubahan perilaku yang disebut pemberdayaan (perempuan)?; dan aspek-aspek otonomi apa saja yang dipengaruhi oleh pendidikan ?

Metode Kajian

Permasalahan kemandirian dan pemberdayaan perempuan dan konteks pendidikan dalam pembahasan ini dilakukan melalui kajian literatur, baik dari teori-teori belajar yang terkait dengan konsep-konsep pemberdayaan dan perubahan sosial. Metode ini digunakan untuk memahami secara komprehensif terhadap aspek-aspek otonomi atau keberdayaan perempuan yang dikondisikan oleh stratifikasi gender dan otoritas patriarkal masyarakat dipengaruhi oleh pendidikan.

Teori Belajar Sosial, Otonomi dan Pemberdayaan

Teori-teori belajar sosial membuka gerbang untuk pengalaman lain yang menawarkan kesadaran baru, pengetahuan baru, dan juga meningkatkan *sense of self-efficacy* peserta belajar. Dalam literatur pendidikan nonformal), tipe pengalaman demikian sering disebut dengan istilah “pemberdayaan” (*empowerment*). Teori-teori belajar sosial (khususnya yang diangkat dalam studi Bandura) lebih jauh digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengkaji pemberdayaan dan indikator-indikator pengukurannya, khususnya untuk meningkatkan otonomi atau keberdayaan peserta belajar, khususnya perempuan, seperti yang disponsori oleh badan A.S. untuk pembangunan internasional (USAID) di Nepal dan Bangladesh.

Jejeebhoy pada tahun 1996 mengkompilasi bukti-bukti empiris untuk konfirmasi pandangan bahwa perubahan-perubahan perilaku perempuan dimediasi oleh akuisisi mereka terhadap “otonomi” (kemandirian). Sementara otonomi perempuan umumnya dikondisikan oleh stratifikasi gender dan otoritas patriarkal masyarakat di mana mereka tinggal, ternyata pendidikan dapat juga meningkatkan otonomi atau kemandirian perempuan. *Jejeebhoy* (1996) menyarankan lima aspek otonomi yang saling bergantung satu sama lain yang dipengaruhi oleh pendidikan:

1. **Otonomi pengetahuan:** Wanita terdidik memiliki pandangan dunia yang lebih luas, perasaan yang lebih kuat pada gaya-gaya hidup alternatif, dan pertanyaan lebih dalam tentang otoritas.
2. **Otonomi dalam membuat-keputusan:** Pendidikan memperkuat apa yang dikatakan perempuan dalam keputusan keluarga dan keputusan-keputusan yang terkait dengan kehidupannya sendiri dan umat manusia. Hal ini berarti bahwa seorang wanita terdidik lebih percaya pada kemampuannya sendiri dalam membuat keputusan atau menyuarakan suatu opini, dan memiliki partisipasi yang lebih tinggi dalam dikusi-dikusi keluarga.
3. **Otonomi fisik:** Wanita terdidik memiliki lebih banyak kontak dengan dunia luar. Wanita yang pernah bersekolah memiliki lebih banyak kebebasan bergerak dan lebih percaya-diri dalam menggunakan layanan-layann yang tersedia.
4. **Otonomi emosional:** Wanita terdidik mengalami pergeseran loyalitas dari kekerabatan keluarga-luas (*extended family*) ke arah keluarga yang didaari hubungan perkawinan (*conjugal family*). Dalam konteks *conjugal family* tersebut, terdapat satu hubungan yang lebih egalitarian

antar-pasangan (suami-isteri), ikatan atau intimasi yang lebih kuat antar-pasangan dan antara orang tua dan anak-anak, dan wanita-wanita yang demikian memiliki nilai-diri yang lebih tinggi dan penyangkalan-diri yang lebih rendah.

5. **Otonomi ekonomi dan sosial dan percaya-diri:** Pendidikan meningkatkan rasa percaya-diri perempuan dalam urusan-urusan ekonomi, dan rasa percaya-diri ini merupakan dasar yang kuat bagi penerimaan dan status sosial; pendidikan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, dan memperbaiki akses pada dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga kemampuan untuk lebih mengandalkan pada dirinya-sendiri, jika dibandingkan dengan anak-anak dan suaminya, untuk mendapatkan status atau penerimaan sosial. Apa yang terjadi di sekolah sehingga membuat warga belajar perempuan menjadi lebih mandiri?

Teori Caldwell berbeda dengan teori-teori yang mendasaari penelitian sosiologi selama awal periode 1960 hingga memasuki modernitas tahun 1980-an. Berdasarkan pemikiran McClelland, dkk., Inkeles (1974) menggunakan suatu konsep modernitas yang umumnya berorientasi pada sikap (*attitudinal*), yakni dengan menggunakan suatu konstruksi “skala modernitas.” Proyek raksasa penelitian Inkeles, dkk. tersebut dilakukan di enam negara, pemikiran yang mendasarinya adalah pandangan hanya terhadap peranan pria dalam kehidupan sosial, dan ruang lingkupnya pun jauh lebih luas daripada pandangan terhadap pendidikan. Namun, definisi persekolahan dibelokkan sedemikian rupa sehingga menjadi memiliki konotasi bahwa sekolah memiliki hubungan kuat dengan modernitas.

Inkeles menyatakan bahwa perubahan-perubahan dalam sikap pria yang telah bersekolah terletak dalam “hakikat sekolah sebagai suatu organisasi sosial.” Sekolah mengajarkan nilai-nilai, sikap-sikap, dan cara-cara bertindak, selain mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengalaman dalam mendapatkan ganjaran dan hukuman (*reward and punishment*), modeling, dan kemampuan untuk menggeneralisasikan keterampilan-keterampilan belajar (*ability to generalize learning skills*). Mekanisme-mekanisme ini menuntun siswa masuk ke dalam suatu cara berpikir, meyakini, dan berbuat/bertindak “modern.” Berdasarkan temuan-temuan penelitiannya, Inkeles menyimpulkan bagaimana pengaruh persekolahan pada kemandirian siswa seperti disajikan dalam kutipan di bawah ini:

Siswa mendapatkan skills dan pengetahuan baru selama usia sekolah dasar, dan sebaliknya selama masa tersebut anak berada dalam suatu keadaan peralihan “membuat/menjadi cukup atau kurang aktif” melakukan kegiatan-kegiatan belajar (learning lull) antara perkembangan pesat pada masa kanak-kanak awal dan masa remaja. Di sekolah, anak belajar membaca, menulis, dan berhitung, membuat rencana dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Ia mendengarkan guru, sehingga ia menjadi serius mengikuti kemauan orang-orang dewasa di luar keluarganya. Jika tidak, sekolah menjadi tidak efektif dan tanpa harapan, ia mengalami keadilan distributif dan mendapat ganjaran karena ia telah mengekspresikan ide-ide baru (Inkeles, 1974).

Dreeben (1968) membantah bahwa ketika anak masuk sekolah, mereka memasuki suatu lingkungan sosial (*social setting*) yang sangat berbeda dengan lingkungan keluarganya – suatu lingkungan yang mempersiapkan mereka berpartisipasi dalam kehidupan institusi-institusi, antara lain, pekerjaan dan masyarakat madani, di luar institusi keluarga. “Tatanan struktural dan pola-pola perilaku guru memberikan pengalaman-pengalaman tertentu pada siswa yang pada umumnya tidak tersedia dalam lingkungan-lingkungan sosial lainnya, dan pengalaman-pengalaman tersebut sesuai dengan karakteristik-karakteristiknya, merepresentasikan kondisi-kondisi yang kondusif untuk pemerolehan norma-norma.” Persekolahan mensosialisasikan siswa dengan mengajarkan kepada mereka norma-norma kebebasan, prestasi, universalisme, dan spesifisitas (mereka belajar memandang diri mereka sendiri sebagai anggota kelompok atau kategori warga masyarakat yang berbeda dengan kelompok lainnya, dan mereka pun mengkuai keunikan-keunikannya).

Esensi teori-teori Caldwell, Inkeles, dan Dreeben adalah bahwa sekolah mempersiapkan siswa dengan suatu lingkungan institusional yang terstruktur dimana mereka belajar memahami dunia. Pelajaran ini berasal dari karakteristik-karakteristik organisasional sekolah - yang bertolak belakang dengan yang diberikan/dipersiapkn keluarga – selain dari kurikulum dan buku-buku pelajaran. Dalam konteks sekolah menunjukkan nilai-nilai dan mekanisme-mekanisme yang berbeda dengan nilai-nilai dan mekanisme-mekanisme dalam keluarga anak, anak dipaksa untuk membut nilai-nilai dan mekanisme-mekanisme tersebut sebagai bagian dari konstruk realitanya sendiri. Karena anak laki-laki memiliki banyak kesempatan untuk terbuka (*exposure*) pada dunia selain pada keluarga, sementara hal itu tidak dapat dilakukan anak-anak perempuan, maka pengaruh persekolahan pada

anak-anak perempuan menjadi lebih dalam dibandingkan dengan pengaruhnya pada anak laki-laki (Jejeebhoy, 1996). Akhirnya dapat ditemukan eksplanasi terakhir bagaimana sekolah mempengaruhi perilaku siswa-siswa perempuan, yakni eksplanasi yang didasarkan pada teori belajar. Teori belajar sosial menjelaskan inkuiri lebih baik daripada teori-teori kognitif. Teori belajar sosial (Bandura, 1986) merumuskan postulat bahwa seorang person yang mengadopsi suatu perilaku baru mesti tidak hanya menjadi menyadari (*aware*) perilaku tersebut, tetapi juga memperoleh suatu perasaan kemampuan diri atau *sense of self-efficacy* – keyakinan bahwa dirinya dapat melakukan perilaku secara efektif dan karenanya dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Individu-individu mendapatkan perasaan (*sense*) semacam itu dengan mengamati orang-orang lain dengan siapa mereka dapat mengidentifikasi dirinya, melakukan perilaku dan berinteraksi dengan orang lain sedemikian rupa sehingga mereka mendapatkan *rewards* untuk mengadopsi perilaku tersebut. Anak-anak di sekolah mendapat suatu rentangan panjang perilaku-perilaku baru dengan cara mengdopsinya dari guru-guru dan teman-teman sebaya, termasuk dari kegiatan-kegiatan pembelajaran membaca dan berhitung, merencanakan penggunaan waktu, dan mengikuti prosedur-prosedur kegiatan sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Meskipun teori-teori belajar sosial dapat membantu menjelaskan hubungan antara persekolahan dan perubahan perilaku, namun sekolah bukanlah satu-satunya lingkungan (*setting*) dimana individu dapat mengamati perilaku-perilaku baru dan mendapatkan *sense of self-efficacy* yang dibutuhkan untuk mengadopsi perilaku-perilaku baru tersebut. Teori-teori belajar sosial membuka gerbang untuk pengalaman-pengalaman lain yang menawarkan kesadaran baru, pengetahuan-pengetahuan baru, dan juga meningkatkan *sense of self-efficacy*. Dalam literatur pendidikan nonformal, tipe pengalaman demikian dikenal sebagai dengan istilah “pemberdayaan” (*empowerment*).

Pembahasan

Sesuai dengan uraian-uraian di atas, dapat ditegaskan esensi kajian terhadap konsep pemberdayaan dan konsep otonomi individu. Secara konseptual-etimologis, istilah ‘pemberdayaan’ berasal dari akar kata *power*, artinya kekuasaan atau keberdayaan. Oleh karena itu, ide utama yang paling mendasari pemberdayaan selalu berkenaan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat pihak atau orang lain melakukan apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Namun, harus dipahami pula bahwa kekuasaan tidak

vakum dan terisolasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kekuasaan tercipta dalam relasi sosial, dan kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antarmanusia. Dalam konteks ini, pemberdayaan sebagai suatu proses perubahan menjadi memiliki konsep yang bermakna.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka menjadi memiliki kekuatan atau kemampuan, antara lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar agar memiliki kebebasan, misalnya, dari kelaparan kebodohan, dan penyakit; menjangkau sumber-sumber produktif untuk meningkatkan pendapatannya; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun pada mulanya digunakan pakar-pakar yang berbeda dalam latar belakang dan fokus penelitiannya, namun dapat dipahami bahwa keduanya memiliki esensi yang sama. Dengan kata lain, pemberdayaan sama dengan otonomi. Implikasi program pemberdayaan atau peningkatan otonomi diri sama-sama untuk meningkatkan kemampuan warga masyarakat sebagai peserta belajar dalam program pendidikan nonformal atau PLS. Jejeebhoy menyatakan otonomi sebagai suatu hubungan kritis antara persekolahan dan perubahan demografik. Dalam definisinya terhadap “otonomi” sama dengan konsep “pemberdayaan” (*empowerment*) dalam literatur PLS. Literatur PLS tentang pemberdayaan sering ditelusuri hingga tahun 1970-an dan karya Paolo Freire dengan masyarakat tertindas di Brazil. Freire sangat peduli pada pemberdayaan kelompok-kelompok pria agar dapat memperoleh akses pada lingkungan sosial-politik. Berbeda dengan Freire tentang otonomi individual atau kemandirian individu, Jejeebhoy memandang pentingnya tumbuhnya terlebih dahulu rasa mampu (*sense of efficacy*) sebelum memahami tindakan secara bersama-sama. Meskipun esensi ajarannya adalah literasi yang menuntut prestasi individual, namun kelompok tidak akan dapat diberdayakan hingga anggota-anggota individual kelompok itu memperoleh *sense of efficacy* dan memahami untuk bertindak secara bersama-sama.

Sesuai dengan pengaruh pemikiran Freire, Kindervatter (1979) dalam studinya tentang pendidikan nonformal sebagai suatu proses pemberdayaan, mendefinisikan pemberdayaan sebagai “upaya untuk mendapat pengertian dan kontrol terhadap kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan/atau politik dalam rangka memperbaiki pengertian [seseorang] dalam kehidupan masyarakat.” Definisi ini sama dengan definisi Jejeebhoy terhadap konsep otonomi, yakni “kemampuan untuk mendapatkan informasi dan menggunakannya sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan tentang apa yang menjadi concerns pribadi seseorang.” Sebagai bahan perbandingan, jika dilihat dari dimensi tujuan, proses, dan cara-cara

pemberdayaan, di bawah ini disajikan empat definisi pemberdayaan yang dikutip Suharto (2005) berturut-turut dari Ife (1995), Parsons, et al. (1994), Swift dan Levin (1987), dan Rappaport (1984):

- **Pemberdayaan bertujuan** untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
- **Pemberdayaan adalah sebuah proses** dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan ini menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons et al., 1995).
- **Pemberdayaan** menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
- **Pemberdayaan** adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, 1984).

Senada dengan definisi otonomi individual Jejeebhoy (1996) yang diuraikan di atas, Ife (1995) menandakan bahwa pemberdayaan memiliki dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Dalam konteks ini, kekuasaan diartikan bukan hanya kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas: (1) pilihan-pilihan personal dan peluang-peluang hidup; (2) pendefinisian kebutuhan; (3) ekspresi ide atau gagasan; (4) lembaga-lembaga (pranata-pranata sosial); (5) sumber-sumber; (6) aktivitas ekonomi; dan (7) reproduksi.

Setiap definisi sebenarnya mencakup suatu pengertian dan kontrol yang lebih baik terhadap situasi yang dialami seseorang. Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, para peneliti telah merumuskan definisi-definisi empiris pemberdayaan dengan tujuan untuk pengukurannya. Di Nepal, agency A.S. untuk pembangunan internasional (USAID) mensurvei wanita-wanita desa bagaimana mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik, bagaimana mereka memandang pemberdayaan, dan dalam hal apa mereka merasa diberdayakan. Mereka memberi respon yang mengindikasikan pengertian mereka terhadap konsep pemberdayaan seperti diuraikan di bawah ini:

- 1) melek atau memiliki kemampuan baca-tulis-hitung sederhana, memiliki pengetahuan, mengerti isu-isu, dan *sharing* pengetahuan dengan orang lain;

- 2) mampu berdiri di atas kaki sendiri, mendukung diri-sendiri, memiliki pekerjaan, dan menentukan pilihan;
- 3) mampu menolong, mengajari, memotivasi orang lain, dan mampu memberikan bantuan untuk memajukan pembangunan di desa/kampungnya;
- 4) tidak mentolerir dominasi, khususnya terhadap perempuan;
- 5) dapat bergerak secara bebas dalam lingkungannya.
- 6) Merasa percaya diri, mampu berbicara dengan jelas, dapat tampil berbicara di depan umum dan dengan pejabat pemerintahan; dan
- 7) Menjadi seorang pemimpin, dapat bekerja sama dengan orang-orang lain dalam suatu kelompok, dan mampu mempertahankan hubungan baik dengan desa (USAID/Nepal, 1996).

Para peneliti tentang partisipasi perempuan dalam program pembangunan masyarakat desa dan kredit perbankan di Bangladesh juga secara empirik mengembangkan indikator-indikator pemberdayaan (Hahemi, Schuler, dan Riley, 1996). Definisi pemberdayaan menurut mereka meliputi:

- 1) Mobilitas (izin dan kemauan melakukan bisnis dan sosialisasi ke luar rumah);
- 2) Sekuritas ekonomi (memiliki rumah, tabungan, dan menggunakan uang tunai);
- 3) Kemampuan untuk melakukan pembelian barang-barang kebutuhan;
- 4) Keterlibatan dengan suami dalam pembuatan keputusan-keputusan penting;
- 5) Relatif bebas dari dominasi oleh keluarga;
- 6) Kesadaran politik dan hukum; dan
- 7) Partisipasi dalam protes publik dan kampanye politik.

Untuk mengetahui tujuan dan fokus pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui indikator-indikator keberdayaan yang mengindikasikan bahwa seseorang atau sekelompok warga tertentu dalam masyarakat berdaya atau tidak. Dengan demikian, jika akan menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat, misalnya, melalui program pelatihan peningkatan ekonomi keluarga masyarakat desa, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek perubahan (misalnya, kelompok ibu-ibu dari keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Dalam kaitan dengan pengembangan indikator-indikator keberdayaan, Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2005: 63-66) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* (indeks keberdayaan). Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tingkat

keberdayaan warga masyarakat yang bersangkutan yang meliputi: (1) kemampuan ekonomi, (2) kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan (3) kemampuan budaya dan politik.

Selanjutnya ketiga aspek indikator keberdayaan tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan atau pemberdayaan, yaitu: (1) kekuasaan di dalam (*power within*) – meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah; (2) kekuasaan untuk (*power to*) – meningkatkan kemampuan individu untuk berubah, dan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses; (3) kekuasaan atas (*power over*) – perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat dan makro, kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut; dan (4) kekuasaan dengan (*power with*) – meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat dan makro.

Meskipun dinyatakan dalam istilah-istilah yang berbeda, untuk maksud-maksud yang berbeda, dan dari perspektif-perspektif yang berbeda pula, namun kedua kategori karakteristik pemberdayaan tersebut – *autonomy* (kemandirian) dan *empowering* (pemberdayaan) - menunjukkan keadaan yang saling tumpang-tindih. Dalam konteks ini, hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan adalah perbedaannya sesuai dengan karakteristik-karakteristiknya. Dalam tabel di bawah ini diilustrasikan konsistensi ketiga definisi otonomi-diri (Jejeebhoy, USAID/Nepal, dan Hashemi et al.) tersebut.

Jejeebhoy	USAID/Nepal	Hashemi et al.
Otonomi Pengetahuan	Menjadi melek, memiliki pengetahuan, dan pengertian	Kesadaran politik dan hukum
Otonomi dalam pembuatan-keputusan	Membuat-pilihan, merasa yakin, jelas berbicara	Terlibat dalam pembuatan-keputusan
Otonomi fisik	-	Mobilitas
Otonomi emosional	Tidak toleran pada dominasi	Bebas dari dominasi kelurga
Otonomi dan reliansi-diri dlm kehidupan ekonomi dan sosial	Mendukung diri-sendiri Memiliki pekerjaan	Sekuritas ekonomi Mampu melakukan pembelian
-	Mampu menolong orang lain; menjadi pemimpin; Dapat bekerajasma	Partisipasi dalam aktivitas politik

Baik USID/Nepal dan Hashemi, et al., sama-sama mencakup karakteristik-karakteristik pemberdayaan yang berhubungan dengan kegiatan di luar keluarga (menolong orang lain, menjadi pemimpin, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik). Sementara itu, karakteristik-karakteristik ini tidak tercakup dalam kerangka yang diajukan Jejeebhoy karena kepentingannya terbatas pada perencanaan keluarga.

Fenomena “pemberdayaan” atau “otonomi” ini merupakan variabel mediasi umum antara (1) pendidikan – formal dan nonformal (PNF/PLS) – dan (2) perubahan demografik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, maka perlu dilengkapi dengan kajian tentang hubungan antara PNF/PLS dengan variabel-variabel yang terkait dengan perubahan demografik (pertumbuhan penduduk dan dampak-dampaknya).

Dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang menjadi pusat perhatian.. Tujuannya selain untuk meningkatkan kemampuan warga masyarakat, juga untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional. Upaya ini tentu saja sebagai respon terhadap tuntutan-tuntutan kehidupan globalisasi. Dalam kaitan ini, Clarke dalam Syukri (2005: 64) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat melalui LSM merupakan kunci efektivitas untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dengan cara ini, masyarakat kecil atau kelompok warga masyarakat ‘akar rumput’ (grassroots) dapat memperoleh keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam kehidupan nyata.

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Bank Paul (1987) yang dikutip Hikmat (2006 4) Dunia sebagai salah satu agen pembangunan internasional misalnya, yakin bahwa partisipasi masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga merupakan sarana efektif yang mampu menjangkau kelompok warga masyarakat paling miskin melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri. Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan strategi efektif untuk menekan dampak-dampak negatif urbanisasi dan industrialisasi. Oleh karena itu, tidak heran jika Bank Dunia menempatkan tema pemberdayaan sebagai salah satu objek utama dalam partisipasi masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pemikirn-pemikiran seperti diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali dijadikan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai suatu proses. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk kelompok individu-individu dan kelompok perempuan yang mengalami kemiskinan.

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai melalui perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan-diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sesuai dengan pemikiran di atas, akhirnya dapat disimpulkan juga bahwa cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah dengan membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Sikap-sikap yang melekat dengan semangat ini, antara lain, berani mengambil resiko, berani bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat. Strategi pemberdayaan itu sendiri meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian.

Daftar Pustaka

- Hikmat, Harry. (2006). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Kata pengantar: Kusnaka Adimihardja. Bandung: Humaniora.
- Ife, Jim. (1995). *Community development: Creating community alternatives, visions, analysis and practice*. Australia: Longman.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Paul, S. (1987). *Community participation in development project*. New York: World Bank.
- Rappaport, J. (1984). *Studies in empowerment: Introduction to the issue, prevention in human issue*. New York.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Swift, C. dan G. Levin. (1987). *Empowerment: An emerging mental health technology*. Journal of primary prevention. New York.

- Syukri, M. (2005). *Model pelatihan keterampilan terpadu untuk peningkatan dan diversifikasi sumber pendapatn masyarakat pedesaan: Studi pemberdayaan masyarakat petani berskala rumahtangga di desa pesisir, Kabupaten Pontianak*. (Disertasi, tidak diterbitkan). Bandung: PPs UPI.
- Zastrow, C. (1992). *The practice of social work*. California: A Division of Wadsworth, Inc.
- Jejeebhoy (1996) [http://www.aed.org/publications/ crosscutting/formal nonformal](http://www.aed.org/publications/crosscutting/formal-nonformal).
-